



Pemkab Benahi Aset Bermasalah

MELAWI, TRIBUN - Wakil Bupati Melawi, Panji, berharap 2015 mendapat Kabupaten Melawi bisa mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pelaporan keuangan.

"Namun jangan asal WTP, harus yang berkualitas. WTP berkualitas itu dihasilkan dari pekerjaan yang berkualitas, kalau kita jadi orang berkualitas dan melaksanakan pekerjaan sesuai aturan dan tulus, WTP akan lahir dengan sendirinya," kata Panji, Selasa (14/10) lalu.

Panji menekankan, WTP bukanlah penilaian hasil akhir yang menjadi tujuan utama. Namun lebih diutamakan pada peningkatan kinerja yang dilakukan semua jajaran yang ada di lingkungan Pemkab Melawi.

"Jadi bisa saja WTP itu tidak berkualitas, kalau kita bekerjanya hanya ingin mencapai hasil itu, sementara pekerjaannya yang dila-

kukan ada perubahan selain pada perbaikan administrasi saja," katanya.

Untuk itu Panji berharap kepada semua staf di jajarannya terus berupaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, baik dalam aspek penganggaran, penata usahaan maupun pelaporan keuangan. "Wujud dari upaya tersebut adalah dengan cara menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian laporan keuangan dapat meningkat hasil opininya," katanya.

Sejak 10 tahun berdiri Kabupaten Melawi memang belum sekalipun mendapatkan WTP, melainkan hanya berhasil mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan sebelumnya Melawi masih berkat pada opini tidak wajar.

Sejumlah persoalan yang menjadi penghambat Kota Juang untuk mendapat WTP dikarekan banyaknya aset yang

belum tertata dengan baik, baik itu aset bangunan maupun aset tanah.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Melawi, Ramda Suhaimi mengatakan, untuk mendukung pencapaian WTP, pihaknya sedang berupaya keras melakukan inventarisir sejumlah aset yang bermasalah. "Kita terus mendata dan menginventarisir aset yang ada, terutama aset hibah dari kabupaten induk," katanya.

Ramda mengungkapkan, beberapa aset yang dimiliki Pemkab Melawi sebagian bahkan masih berada pada pihak ketiga atau diklaim sebagai aset pribadi. Aset inilah yang harus digenahkan terlebih dahulu. "Sebagian aset sudah ada yang bisa kita selesaikan, namun masih ada beberapa yang belum, kita akan lakukan pendataan secara terus menerus," katanya. (ali)